

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil

penelitian, analisis, dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi dokter melalui *Hospital By-Laws* Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalah jaminan perlindungan hukum, legal administratif, kewenangan praktik profesi / asuhan klinis, pengaturan praktik klinis, mutu pelayanan medis, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang bermutu serta larangan dan sanksi.
2. Bentuk perlindungan hukum represif bagi dokter melalui *Hospital By-Laws* Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalah penanganan komplain dan klaim, investigasi, penyelesaian, dan pembiayaan kasus sengketa medis.
3. Model implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi dokter di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalah model kesesuaian, yaitu terdapat kesesuaian antara program, manajemen selaku pelaksana, dan dokter selaku penerima manfaat. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi model perlindungan hukum bagi dokter di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru adalah komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, disposisi

yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang sederhana namun efisien.

B. Saran

Beberapasarandaripenelitisetelahmelakukanpenelitianiniadalahsebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- a. Hasil temuan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi dokter dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menyusun peraturan tentang perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga Kesehatan.
- b. Bagi Lembaga Akreditasi Rumah Sakit agar dapat memasukkan perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya sebagai salah satu kriteria penilaian akreditasi rumah sakit.

2. Bagi Rumah Sakit

- a. Dalam Menyusun *Hospital By-Laws* diharapkan rumah sakit memenuhi unsur materi minimal yang harus diatur berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By-Laws*) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

- b. Temuan bentuk-bentuk perlindungan hukum pada penelitian ini juga dapat menjadi literatur bagi rumah sakit lain yang akan menyusun *Hospital By-Laws* khususnya terkait perlindungan hukum bagi dokter.
- c. Dalam perlindungan hukum represif disarankan pada rumah sakit agar dapat membentuk tim atau unit khusus yang menangani kasus sengketa medis.
- d. Rumah sakit perlu menerapkan manajemen risiko terkait kemungkinan terjadinya sengketa medis dan menyusun *road map* penanganan kasus sengketa medis.

3. Bagi Dokter

- a. Agar senantiasa dapat membaca dengan seksama terkait dengan *Hospital By-Laws*, Standar Prosedur Operasional, dan Perjanjian Kerja di rumah sakit dimana mereka bekerja sehingga mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan.
- b. Mematuhi dan menjalankan *Hospital By-Laws* dan Standar Prosedur Operasional yang ada di rumah sakit masing-masing agar mendapat perlindungan hukum secara optimal.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Model perlindungan hukum bagi dokter yang didapat masih dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian yuridis normatif dan penelitian kuantitatif sehingga bisa didapatkan bentuk lain dari model implementasi kebijakan.

- b. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait perlindungan hukum bagi dokter pada rumah sakit pemerintah dan rumah sakit dengan kepemilikan yayasan.
- c. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan implementasi kebijakan yang lain untuk mendapatkan faktor-faktor lain yang memengaruhi implementasi model perlindungan hukum bagi dokter di rumah sakit terutama faktor-faktor yang menghambat seperti faktor yuridis dan faktor teknis.
- d. Bagi peneliti berikutnya, penelitian tentang perlindungan hukum bagi dokter masih dapat dilakukan karena masih ditemukan adanya *research gap* dari hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Suprijono, 2014. *Cooperative Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM*. Pustaka Pelajar, Surabaya.
- BahderJohanNasution, 2005, *HukumKesehatan–Pertanggungjawaban Dokter*, RinekaCipta, Jakarta.
- Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West, New York.
- Dedi Afandi, dkk, 2021, *Buku Ajar Trilogi Praktik Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru.
- Encep Syarief Nurdin, 2019, *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Maulana Media Grafika, Bandung.
- Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, CV. Keni Media, Bandung.
- Gunawan Aineka, 2018, *Tinjauan Etis dan Yuridis Status Embrio Sisa Bayi Tabung (In Vitro Fertilization) di Indonesia*, Tesis, Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Katy Börner, et al., 2014, *An introduction to modeling science: Basic model types, key definitions, and a general framework for the comparison of process models*, Chapter1 in *Models of science dynamics - Encounters between complexity theory and information sciences*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin.
- Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi penelitian Kualitatif, edisi revisi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maiyestati, 2021, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Maryati dan Sutarno, 2022, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Dokter dalam Tindakan Aborsi*, Penerbit NEM, Pekalongan, hlm. 154.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Erwin 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Muh. Nasser, 2012. *Medical Dispute in Indonesia Health*. Springer Reference, London.
- Nuryanti Mustari, 2015, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, LeutikaPrio, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Risma Situmorang, 2020, *Perlindungan Hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Perawat*, Cendekia Press, Jakarta.
- Robert F Hachiya, Robert J Shoop, and Dennis R Dunklee, 2014, *Chapter One: Preventive Law, in: The principal's quick-reference guide to school law: Reducing liability, litigation, and other potential legal tangles*, Corwin Press, California.
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek: Medis dan Mediasi – sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, hlm.8.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, edisi 1 cetakan 5, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Suwitri, 2014, *Analisis Kebijakan Publik (Edisi 2)*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Thomas R. Dye. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York.
- Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By-Laws*).

C. SUMBER LAIN

Adriana Biba Starman, 2013, The case study as a type of qualitative research, *Journal of Contemporary Educational Studies*, Vol. 64 Issue 1, March 2013.

Agnieszka Gurbiel, 2018, Triangulation as a method of the research in jurisprudence, *World Scientific News*, Vol 110, 15 September 2018.

Albine Moser and Irene Korstjens, 2018, Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis, *European Journal of General Practice*, Vol 24 No1, 2018.

Alisa Maulana, 2021, Implementasi *Hospital Bylaws* Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit, *Juristic*, Vol 2 No 3, Desember 2021.

Alman Manongga, Sofia Pangemanan, dan Josef Kairupan, 2018, Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung, *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1, 2018.

Andi Baji Sulolipu, Susilo Handoyo, dan Roziqin, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan, *Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba*, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2019.

Arif Nuryanto, 2012, Model Perlindungan Hukum Profesi Dokter, *Jurisprudence*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2012.

Ariska Tri Viky Andani, Endah Setyowati, dan Fadillah Amin, 2019, Implementasi Program Pelayanan *One Day Service* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol 5 No 3, 2019.

Asdel Fira, 2019, *Hospital By-Laws sebagai Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit*, 1 Juli 2019, Jakarta, <https://siplawfirm.id/hospital-by-laws/?lang=id>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022, *Jumlah Sarana Kesehatan (Unit)*, 2019-2021, September 2022, Pekanbaru, <https://riau.bps.go.id/indicator/30/164/1/jumlah-sarana-kesehatan.html>
- Bevinahalli N Raveesh, Ragavendra B Nayak, and Shivakumar F Kumbar, 2016, Preventing medico-legal issues in clinical practice, *Annals of Indian Academy of Neurology*, Vol 19 Suppl 1, 2016.
- Brian Dolan, B, 2021, The Medical Profession Through History. *Perspectives in Medical Humanities*, supplement 1, August 2021.
- Carl May, 2013, Towards a general theory of implementation. *Implementation Science*, Volume 8 Nomor 18, 2013.
- Center for Disease Control and Prevention, 2022, *Hospital*, August 12, 2022, Atlanta USA, <https://www.cdc.gov/nchs/hus/sources-definitions/hospital.htm>
- Debi Christian Lubis, Nuryakin, dan Mahendro Prasetyo Kusumo, 2021, Complaint Handling Management at St. Rafael Cancar General Hospital. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol 4 No 3, 2021.
- Deri Mulyadi, dkk, 2020, Medical Negligence Dispute Settlement in Indonesia, *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, Vol 14 No 4, October-December 2020.
- Diana Haiti, 2017, Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medis Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Badamai Law Journal*, Vol 2 No 2, 2017.
- Dimas Cahyo Widhiantoro, Michael Barama, dan Elko L. Mamesah, 2021, Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol IX No 9, Agustus 2021.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Fira Mubayyinah, 2019, Legal Review of Indefinite Revocation of The Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts, *Prophetic Law Review*, Volume 1 Issue 1, December 2019.
- Ericha Rewur, Nontje Rimbing, dan Veibe V. Sumilat, 2021, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Bagi Dokter Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Lex Crimen* Vol X No 6, Mei 2021.
- General Medical Council UK, 2019, *Insurance, indemnity, and medico-legal support*, 2019, diakses dari <https://www.gmc-uk.org/registration-and-licensing/managing-your-registration/information-for-doctors-on-the-register/insurance-indemnity-and-medico-legal-support>
- Haeruddin Fajar, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Telah Melaksanakan Tugasnya Sesuai Dengan Prosedur Menurut Undang-

- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Volume 6 Nomor 1, 2019.
- Haedar Akib, 2010, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1 No,1, 2010.
- Hamdani Abubakar, 2018, Kedudukan Audit Medis dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Medis, *Lex Renaissance*, Vol 3 No 2, 2018.
- Hasrul Buamona, 2014, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012), *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol2 No 2, 2014.
- Indra Darmanto, 2013, Implementasi kebijakan peraturan internal rumah sakit (Hospital by-Laws) di RSUD Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013, diakses dari <https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jspdetail?id=20335567&lokasi=lokal>
- Istiana Herani dan Munajah, 2019, Aspek Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, *Prosiding Hasil-Hasil Penelitian tahun 2019 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan*, 2019.
- Iqbal Maban RM, Zil Fadhilah Arranury, and Abd. Rahman R., 2022, The Effect of Communication on The Implementation of The Policy for The Utilization of JKN Capitation Fund at The Barana Health Center Jeneponto Regency, *Hospital Management Studies Journal*, Vol 3 No 2, 2022.
- John F Horthy, 1964, The Status of The Doctrine of Charitable Immunity in Hospital Cases, *Ohio State Law Journal*, Volume 25 Issue 3, Summer 1964.
- Jonathan Hendran, 2019, Rancangan Upaya Mediasi Sengketa Medis Di Rumah Sakit RK Charitas Palembang, *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, Vol 3 No. 1, April 2019.
- Juhari, 2016, Status Hukum Rumah Sakit Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Oktober 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2022, *Dokter*, <https://kbbi.web.id/dokter>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2022, *Implementasi*, <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2022, *Model*, <https://kbbi.web.id/model>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2022, *Rumah Sakit*, <https://kbbi.web.id/rumah%20sakit>
- Kasyfi Hartati, Hanevi Djasri, dan Adi Utarini, 2014, Implementasi Tata Kelola Klinis Oleh Komite Medik di Rumah Sakit Umum Daerah di

Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol 17 No 1, Maret 2014.

Kumaralingam Amirthalingam, 2017, Medical dispute resolution, patient safety, and the doctor-patient relationship. *Singapore Medical Journal*, Vol 58 No 12, Dec 2017.

Kyagus Badius Sani, 2022, Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol 2 No 1, Maret 2022.

Lalu Riyana Dody Setiawan, M. Galang Asmara, dan Chrisdianto Eko Purnomo, 2019, Hospital By-Laws: Implikasi Penerapannya, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2019.

Lee Theng Lim, et al., 2022, Medico-legal dispute resolution: Experience of a tertiary-care hospital in Singapore, *PLoS ONE*, Vol 17 No 10, 2022.

Lucia Murniati, Endang Wahyati Y, dan Siswo Putranto Santoso, 2016, Implementasi *Hospital By-Laws* Di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya Permenkes Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medis di Rumah Sakit, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Volume 2 Nomor 2, 2016.

M. Muslih, 2013, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas*, Volume IV Nomor 1, Juni 2013.

M. Natsir Nugroho dan Aliyus Kusumaningrum, 2012, Upaya Meningkatkan Good Corporate Governance Dengan Penetapan Hospital By-Laws/Statuta Di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur, *JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit)*, Vol 1 No 1, 2012.

Malau, EP, 2021, "Alasan Alat Rusak, Pasien yang Sempat Dibius Tidak Jadi Dioperasi di RSUD Sidikalang", 19 Oktober 2021, Sidikalang, <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Alasan-Alat-Rusak--Pasien-yang-Sempat-Dibius-Tidak-Jadi-Dioperasi-di-RSUD-Sidikalang>

Medecins Sans Frontiers, 2022, *Medical Personnel*, 2022, Geneva Switzerland, <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/medical-personnel/>

Michael Sunday Afolayan and Omolade Adeyemi Oniyinde, 2019, Interviews and Questionnaires as Legal Research Instruments, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 83, 2019.

Michel Daniel Mangkey, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, *Lex et Societatis*, Vol II No 8, Sep-Nov 2014.

- Mochammad Istiadjud Eddy Santoso, dkk, 2017, The Implementation of Civil Law on Doctor-Patient Relationships in Indonesia. *The Social Sciences*, Vol 12, 2017.
- Manoj Chandra Mathur, 2020, Professional Medical Indemnity Insurance - Protection for the experts, by the experts. *Indian Journal of Ophthalmology*, Vol 68 No 1, Jan 2020.
- Muhammad Gilang Ramadhan, dkk, 2022, Analysis of Elite Sports Development Patterns through Sports Education, *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, Vol 10 No 4, 2022.
- Muhammad Purnomo, 2016, Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Hospital By-Laws Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Gubug Grobogan Tahun 2010, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Volume 7 Nomor 1, 2016.
- Ni Putu Ayu Myra Gerhana Putri, 2019, Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 2, 2019.
- Nita Sri Mardiani, 2018, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang Terhadap Proses Kredensial Tenaga Medis', *Aktualita*, Vol 1 No 2, Desember 2018.
- Peter Mahmudz Marzuki, 2022, The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. *Yuridika*, Volume 37 No 1, Januari 2022.
- Putri Ramadhani dan Suswanta, 2019, Implementation of Government Programs in Facilitating Employment Opportunities for Persons with Disabilities in Special Region of Yogyakarta, *Journal of Governance and Public Policy*, Vol 6 No 3, Oktober 2019.
- Riasti Elsadira Koesnindar, Budi Santoso, dan Irawati, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Tagihan Akibat Penambahan Kecepatan Internet Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indihome, *Diponegoro Law Journal*, Vol 11 No 2, 2022.
- Roby Hadi Putra dan Afriva Khaidir, A, 2019, Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera, *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Volume 15 Number 1, June 2019.
- Rossi Suparman, 2019, Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis, *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 17 No 2, 2019.
- Safitri Hariyani Saptogino, 2019, *Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia*, 2019, <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-medis-di-indonesia/?lang=id>

- Sanya Kenaphoom and Burachat Jandaeng, 2019, Theory Model of Public Policy Implementation, *Journal of Local Governance and Innovation*, Vol 3 No 1, January-April 2019.
- Sherliana Hana Purwanti, Suryawan Raharjo, dan JS Murdomo, 2020, Tinjauan yuridis konsekuensi pidana pada pelanggaran informed consent sebagai dasar transaksi terapeutik penyelenggaraan praktek kedokteran. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol 3 No 2, 2020.
- Syahrul Mubarak, dkk, 2020, Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework, *Journal of Public Administration Studies*, Vol 5 No 1, 2020.
- Sylvia R Cruess, Sharon Johnston, and Richard L Cruess, 2004, "Profession": a working definition for medical educators, *Teaching and Learning in Medicine: An International Journal*, Vol 16 No 1, 2004 Winter.
- The Joint Commission, 2022, *Focused Professional Practice Evaluation (FPPE) - Understanding The Requirements*, 10 May 2022, dikases dari <https://www.jointcommission.org/standards/standard-faqs/critical-access-hospital/medical-staff-ms/000001485/>
- Tianlu Yin, Zhaojie Liu, and Yanli Xu, 2019, Analysis of Crisis Management of Medical Disputes in China and Australia: A Narrative Review Article. *Iranian Journal of Public Health*, Vol 48 No 12, Des 2019.
- Ukilah Supriyatin, 2018, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 6 No 1, 2018.
- Veronica Komalawati dan Dhany Kurniawan, D, 2018. Kompetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol 3 No 1, 2018.
- Vini H. R. Gosal, Aaltje E. Manampiring, dan Caecilia Waha, 2022, Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis, *Medical Scope Journal*, Vol. 4 No 1, 2022.
- Wahyu Andrianto, 2021, *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit di Indonesia*, 26 Februari 2021, Jakarta, diakses dari <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>
- Wahyu Andrianto dan Djarot Dimas Achmad Andaru, 2019, Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49 No 4, Oktober-Desember 2019.
- Wahyu Andrianto, Djarot Dimas Achmad Andaru, dan Thalia Prameswari, 2021, Reconstruction of Indonesian Government and Hospital Liability

in Medico-Legal Dispute Settlement, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol 24 No 5, 2021.

- Wellem Hendra Balubun, Valentinus Suroto, dan Edi Sumarwanto, 2018, Provisions of Indonesian Medical Discipline Sanctions to Protect the Rights of Patients be Reviewed From the principle of the Establishment of Legislation. *SOEPRA*, Vol 4 No 2, 2018.
- Widodo Tresno Novianto, 2015, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur KelalaianMalpraktek Medis (Medical Malpractice), *Yustisia*. Vol 4 No 2, Mei - Agustus 2015.
- William M Sage, Richard C Boothman, and Thomas H Gallagher, 2020, Another medical malpractice crisis? try something different, *JAMA*, Vol 324 No 14, 2020.
- Yulfrina Andriani, 2018, Pengaturan dan Implementasi Hospital By-Laws di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah), *Jurnal Cepalo*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Yussy A. Mannas, 2018, Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, Volume 6 Nomor 1, 2018.